



Media: Republika

Hari: Sabtu

Tanggal: 07 Juli 2018

Halaman: 7

Ribuan Data Pemilih Bermasalah

● WAHYU SURYANA

Imbauan lisan telah diberikan untuk memperbaiki tata cara penempelan DPS.

YOGYAKARTA – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Yogyakarta sampai saat ini masih menemukan data bermasalah dari Data Pemilih Sementara (DPS) di KPU Kota Yogyakarta. Tidak tanggung-tanggung, data bermasalah ditemukan mencapai ribuan DPS.

Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta, Iwan Ferdian menyampaikan, pada 17 Juni 2018 KPU Kota Yogyakarta telah menetapkan DPS untuk Kota Yogyakarta dengan total 300.863. Terdiri dari 144.179 pemilih laki-laki dan 156.684 pemilih perempuan.

Dari situ, Panwaslu mengadakan pengawasan terhadap penempelan DPS dan didapati sejumlah masalah. Mulai adanya DPS yang tidak ditem-

pel lapi, digantung, DPS yang ditempel di tempat tidak strategis, dan lain-lain.

"Untuk permasalahan penempelan DPS, Panwaslu se-Kota Yogyakarta sudah memberikan imbauan lisan untuk memperbaiki tata cara dan lokasi penempelan DPS," kata Iwan saat ditemui di Diskominfo Kota Yogyakarta, Jumat (6/7).

Setelah itu, didapati masalah seperti di Mergansan yang terdapat DPS yang tidak membuat kolom nama untuk semua pemilih di TPS tujuh Kelurahan Keparakan. Panwaslu dan Panwaslu Kota Yogyakarta telah mengimbau agar DPS itu segera diganti.

Sebab, sudah seharusnya DPS lengkap dengan memuat nama pemilih, dan sudah diganti oleh PPS Kelurahan Keparakan. Selain pengawasan lapangan, Panwaslu melakukan penyisiran atas data *soft copy* DPS. "Dan didapati 1.260 data pemilih bermasalah di Kota Yogyakarta," ujar Iwan.

Rinciannya, 10 orang data pemilih tanpa nomor induk kependudukan, 1.019 orang data pemilih ganda, satu orang TNI Polri aktif yang terdaftar sebagai pemilih, dan 103 orang pemilih meninggal dunia yang terdaftar.

Ada pula 49 orang pemilih tidak jelas identitasnya yang terdaftar, dan 65 orang pemilih yang memenuhi syarat-syarat tetapi malah tidak terdaftar. Selain itu, didapat pemilih tidak sesuai domisili dan pemilih belum memiliki KTP lapi terdaftar.

"Untuk dua kategori pemilih itu masih dalam tahap kroscek ulang di lapangan," kata Iwan.

Daftar pemilih bermasalah hasil pencermatan dan pengawasan Panwaslu Kota Yogyakarta akan dibenarkan kepada KPU Kota Yogyakarta sebagai saran rekomendasi untuk segera diperbaiki. Tentu ada sanksi jika sampai 8 Juli 2018 belum diperbaiki.

Sampai saat ini, Panwaslu Kota Yogyakarta terus melakukan pencermatan dan pengawasan terhadap data-data pemilih di Kota Yogyakarta. Namun, Iwan menegaskan, banyak atau satu pemilih saja bermasalah tetap ada dugaan pelanggaran. "Dan Panwaslu Kota Yogyakarta masih dilakukan terus pencermatan dan pengawasan, jadi jumlah DPS ber-

masalah masih mungkin bertambah," ujar Iwan.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, meminta KPU mencermati temuan kasus DPT ganda dalam Pilkada 2018. Menurut Abhan, hal ini penting mengingat daftar pemilih Pilkada tahun ini menjadi basis data untuk Pemilu 2019.

"Saya akan sampaikan ke KPU soal data pemilih yang ganda ini. Sebab, ke depannya ini akan menjadi basis DPT Pemilu 2019. Karena itu, semua harus valid," kata Abhan di Semarang beberapa waktu lalu.

Penegasan ini menyusul temuan adanya DPT ganda atas nama Mendagri, Tjahjo Kumolo. Tjahjo yang saat ini sudah resmi menjadi warga DKI Jakarta tercatat masih terdaftar dalam DPT Jawa Tengah.

"Hal ini jangan dianggap remeh, sebab bisa jadi bukan hanya Pak Tjahjo yang ganda dalam DPT. Maka perlu validasi mendalam soal data penduduk, khususnya bagi mereka yang pernah melakukan perpindahan tempat tinggal," kata Abhan.

■ diantarika ed: fernan rahadi

IG: [trihastono](https://www.instagram.com/trihastono), S.Sos, MM
 NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi

1. Panwaslu Kota Jk
2.
3.
4.
5.

✓ Netral
 ✓ Biasa
 ✓ Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005